

Judul : Tarif Listrik Nonsubsidi Dipastikan Naik
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 8

Tarif Listrik Nonsubsidi Dipastikan Naik

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan menyesuaikan tarif listrik nonsubsidi (*tariff adjustment*) pada tahun ini. Keputusan tersebut sudah ditegaskan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebutkan kenaikan tarif listrik nonsubsidi dilakukan karena pemerintah telah menahan penyesuaian tarif sejak 2017. Sesuai kesepakatan dengan Banggar DPR, *automatic tariff adjustment* (Atta) atau penyesuaian tarif listrik akan ditinjau dalam kurun waktu maksimal enam bulan.

"Sejak 2017 kita menahan, tentu ada ongkosnya berupa kompensasi dan betul di Banggar terakhir kita sepakat 2022 ini akan diterapkan, maksimal enam bulanlah, artinya selanjutnya tidak," kata Rida dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin.

Lebih lanjut Rida mengatakan, penyesuaian tarif ini belum ditentukan kapan akan dimulai. Namun, yang jelas penerapannya bersifat kondisional dan memperhatikan kondisi ekonomi saat ini.

"Saya enggak tahu setelah Omicron ada apa lagi, jangan sampai ada yang selanjutnya. Kalau sekiranya daya beli masyarakat sudah baik, daya saing industri makin kompetitif, ya kenapa pulak kita tahan," ungkapnya.

Dia juga berharap kondisi perekonomian akan segera pulih. Apalagi, pemerintah telah menggelontorkan Rp25 triliun untuk subsidi listrik. Rida menuturkan, evaluasi penyesuaian

an tarif listrik dilakukan pertiga bulan (per kuartal) dan untuk kuartal pertama tahun ini tidak ada penyesuaian tarif listrik.

"Kuartal kedua, ketiga, dan keempat belum ditentukan, tapi saya perkirakan karena ada Omicron, kuartal kedua mungkin enggak (dibebaskan). Kuartal ketiga dan keempat mungkin. Pertimbangannya, kita tunggu dulu kondisi, termasuk komoditas minyak goreng, elpiji, kita tunggu 'anteng', jangan semuanya naik," jelas Rida.

Tahun ini Kementerian ESDM juga berencana mereformasi penyaluran subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Reformasi tersebut menyangkut dua hal, yakni dari sisi mekanisme dan tarif listrik. Rida menyebutkan, mekanisme subsidi listrik yang disiapkan berupa subsidi secara langsung.

"Nanti semua pelanggan itu bayarnya sesuai tarif, yang non-subsidi. Noh, yang berhak disubsidi itu bisa dikasih berupa *cash* atau *voucher*, dan itu hanya bisa dipakai untuk bayar listrik saja,

enggak bisa yang lain," ujar Rida. Rida mengatakan, mekanisme subsidi ini tengah digodok oleh pemerintah, mulai dari cara penyaluran subsidi hingga daftar penerimaannya. Dia memastikan, perubahan skema ini tidak akan menambah beban masyarakat. "Yang pasti kita jangan buat aturan yang menyusahkan rakyat," tegasnya.

Untuk tarif listrik subsidi, lanjut Rida, juga akan dilakukan perubahan. Rida menyebutkan, sejak 2003 tarif listrik bersubsidi tidak pernah berubah.

Dia mengungkapkan bahwa agar reformasi penyaluran subsidi bisa berjalan dengan baik, data penerima subsidi harus ditetapkan lebih dulu. Minimal 85% data penerima subsidi harus sesuai dengan fakta dan kondisi nyata di lapangan.

"Tapi, lucunya, data ini semakin kita kejar semakin dinamis, mau enggak mau kita harus punya acuan data, dan statusnya kapan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memastikan

krisis pasokan batubara bagi pembangkit listrik nasional sudah lewat. Hal ini didasarkan pada pertambahan jumlah hari operasi (HOP) pembangkit yang hingga hari ini semakin membaik.

Menurut Rida, sebelumnya terdapat 17 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengalami krisis pasokan batubara. Kini kondisi 17 PLTU tersebut sudah semakin membaik.

"HOP itu tiap hari kita pantau. Selama ini kita *pelototin* 17 PLTU yang krisis pasokan. Kian hari sampai hari ini tanggal 18 Januari sudah membaik dan kita punya target sampai akhir Januari di atas 20 rata-rata HOP-nya," paparnya.

Rida menambahkan, stok batubara yang akan dikirim ke pembangkit listrik juga sudah tersedia. Begitu juga dengan jadwal keberangkatan kapal pengangkutnya. "Tiap hari PLN dan Ditjen Minerba pantau, kapan *loading*-nya kita kawal," tandasnya.

Karena itu, Rida menegaskan

kan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pemadaman listrik bergilir ke depan. "Dari hari ke hari *getting much better* bisa saya bilang. Dengan sendirinya ancaman mati lampu atau pemadaman bergilir bisa dikatakan tidak perlu khawatir lagi," ujarnya.

Dia pun menambahkan, tidak hanya 17 PLTU yang sempat kekurangan stok, namun seluruh PLTU juga akan dipantau ketersediaan batubaranya untuk memastikan krisis tidak akan terjadi lagi di masa depan. "Target kita di Januari itu ada yang 30 HOP-nya, tapi rata-rata di atas 20 HOP. Yang IPP saja 15 HOP, tapi selebihnya hampir 20 HOP," pungkasnya.

Sebelumnya PT PLN (Persero) memastikan biaya pemasangan listrik baru tahun ini tidak berubah. Pengguna tetap membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan sejak 2017. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Mardifi mengatakan, biaya pemasangan baru

masih berdasarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017. "Aturan tersebut belum mengalami revisi sehingga masih berlaku hingga saat ini," ungkap Agung.

Dia menjelaskan, biaya pasang listrik baru prabayar beragam sesuai dengan daya yang dipilih. Untuk pasang listrik baru daya 450 VA biayanya Rp421.000 dan untuk daya 900 VA sebesar Rp843.000. Sementara biaya pasang listrik baru daya 1.300 VA dipatok Rp1.218.000. "Biaya pasang listrik baru daya 2.200 VA sebesar Rp2.062.000 dan daya 3.500 VA Rp3.391.500," ujar Agung.

Untuk memudahkan pelanggan melakukan pemasangan listrik baru, PLN menghadirkan layanan digital melalui aplikasi dan website. "Jika dulu pelanggan harus ke kantor pelayanan untuk pasang baru, sekarang dengan mudah lewat sentuhan jari pada *gadget*, cukup melalui PLN Mobile," tutupnya.

@athikaraha